

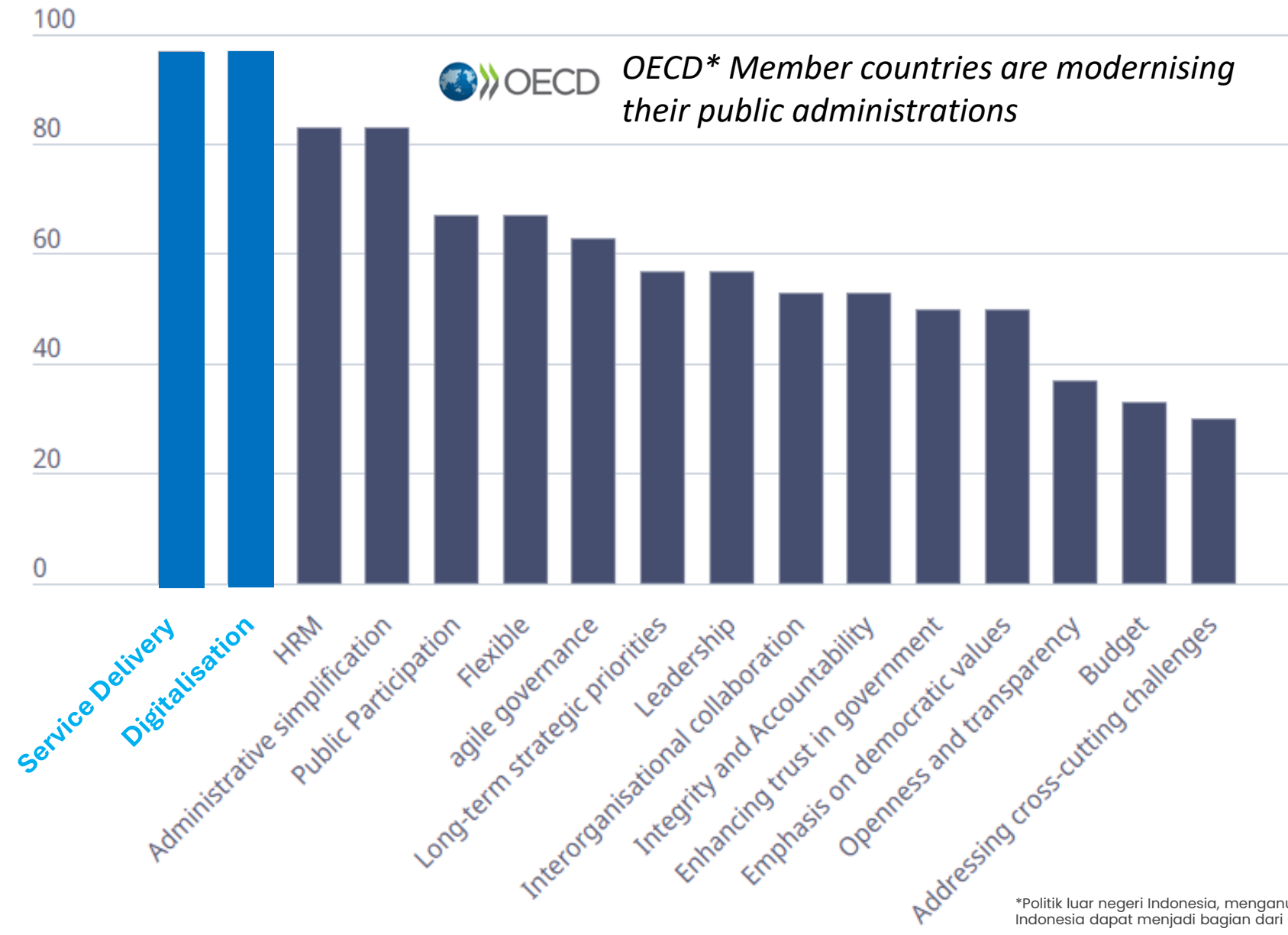
TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH **UNTUK** EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

18 Desember 2024

PUBLIC ADMINISTRATION MODERNIZATION

%

■ Priorities for public administration reform



Modernisasi Administrasi Negara untuk Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintah

Negara-negara maju di dunia terus mendorong modernisasi administrasi negara, berdasarkan data statistik, maka kedua tertinggi aspek prioritas, yaitu aspek *service delivery* dan *digitalisation*.

Modernisasi ini penting untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan pemerintah dalam menghadapi krisis global serta tantangan yang bersifat lintas sektoral.

Service Delivery/Pelayanan Publik dan Digitalisation/Digitalisasi menjadi prioritas utama dalam rangka menghadirkan pemerintah yang lebih responsif.

Strategi Pemerintah Digital berfokus pada **Layanan Digital Prioritas** dengan **Digital Public Infrastructure** sebagai fondasi keterpaduan

Agenda Prioritas Transformasi Digital Nasional



Pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Okt '24 yang berkaitan dengan **prioritas di bidang Digital**



Transformasi Digital untuk ketepatan sasaran Bantuan Sosial dan Subsidi



Transformasi Digital untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dan layanan digital prioritas lainnya yang didukung dengan **backbone** sistem prioritas (DPI) yang terpadu



Portal Layanan Publik (Moments of Life) dan Portal Administrasi Pemerintahan



Digital Public Infrastructure sebagai **backbone** interoperabilitas dan keterpaduan

Wujud lanjutan **Sistem Digital Prioritas** keterpaduan Layanan Digital Nasional

e-katalog Pengadaan Barang dan Jasa publik

K/L terkait:



dan K/L terkait lainnya

Sistem Informasi Mineral dan Batubara

K/L terkait:



dan K/L terkait lainnya

Distribusi Bantuan Sosial & Subsidi

K/L terkait:



dan K/L terkait lainnya

Ketepatan Sasaran Bansos & Subsidi

Layanan Digital Masyarakat berdasarkan Moments of Life



Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (anti-fraud by design) KPK



Pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai infrastruktur interoperabilitas



Digital Identity

Data Exchange

Digital Payment

Fondasi kebijakan dan wujud awal keterpaduan perlu dilanjutkan dengan penyusunan strategi

Fondasi Kebijakan



Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Perpres 95/2018

Perpres Arsitektur SPBE

Perpres 132/2022



Perpres Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019



Perpres Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) Perpres 82/2022



Perpres Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber Perpres 47/2023

UU Pelindungan Data Pribadi

UU 27/2022

UU Informasi & Transaksi Elektronik

UU 1/2024



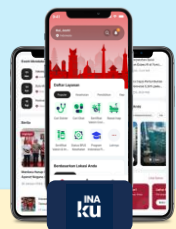
Perpres Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Perpres 82/2023

Fondasi Tata Kelola

- Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk koordinasi & penerapan kebijakan
- Arsitektur SPBE Nasional sebagai kerangka dasar keterpaduan & penyelarasan

Wujud awal Keterpaduan



Portal Pelayanan Publik



Identitas Digital Terpadu



Portal Administrasi Pemerintahan

dengan hasil Rilis Terbatas Tahap Pertama ...

evaluasi kemudahan penggunaan, dan potensi perbaikan produk/fitur

dan rencana revisi Perpres 82/2023...

terkait konsolidasi anggaran dan desain arsitektur terpadu yang saat ini masih tersebar di setiap K/L

Langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk melanjutkan Momentum Transformasi Digital Pemerintah

- 1 Menata **fokus layanan & sistem digital prioritas** sebagai fondasi integrasi/interoperabilitas
- 2 Memaksimalkan **penguatan kelembagaan dan kewenangan** terkait **Pemerintah Digital** di Kabinet Merah Putih
- 3 Memperkuat **mekanisme enabler** transformasi digital pemerintah melalui **Keterpaduan Layanan Digital Nasional**

Penyusunan **Strategi Transformasi Digital Pemerintah** sebagai strategi pencapaian target **Pembangunan Nasional 2025 - 2029**



TRANSFORMASI TATA KELOLA INSTANSI PEMERINTAH



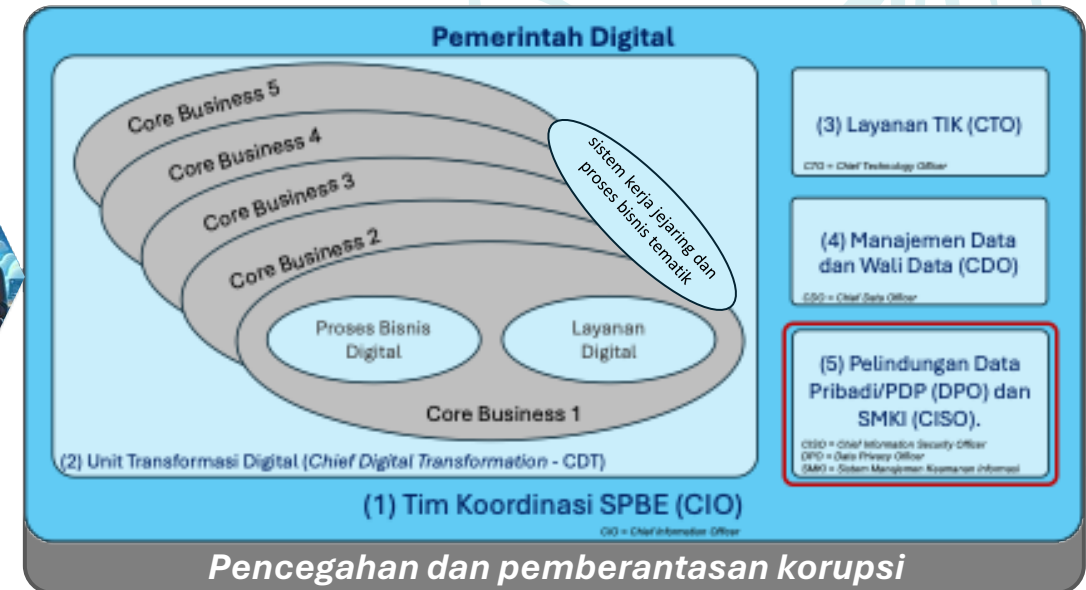
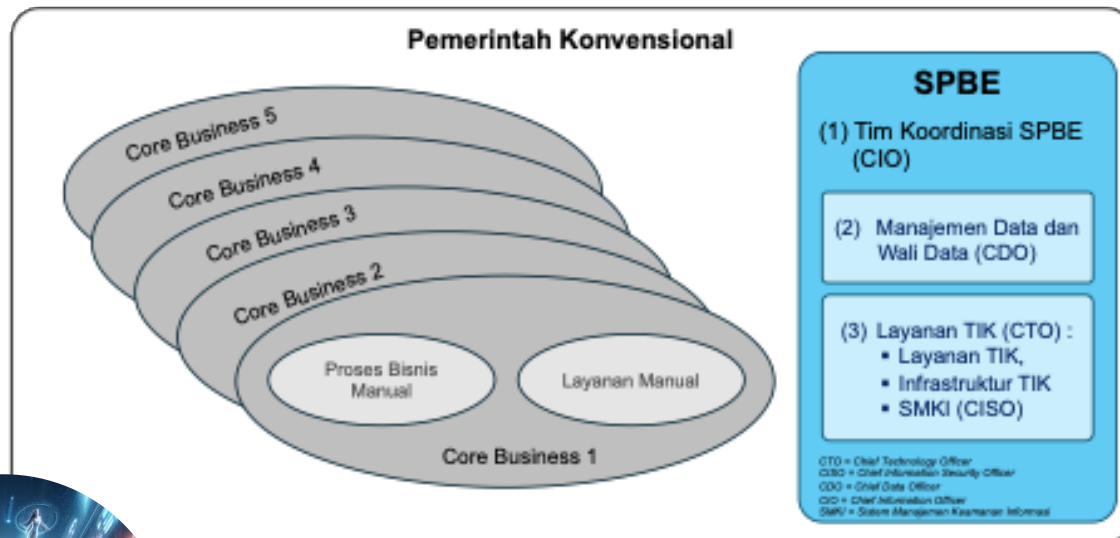
Existing

- Core business **tidak perlu** punya visi digital.
- Peran transformasi digital **hanya** ke Unit TIK.
- Unit Kerja **tidak menuntut** pegawai memiliki talenta digital.
- Silo** menyelesaikan pekerjaan dan masalah.
- Menemukan cara **bekerja /layanan manual** yang lebih efisien.



Future

- Core Business **memiliki** visi digital.
- Transformasi digital adalah **ownership** holistik instansi.
- Unit kerja **tidak ingin** pegawai **gaptek**.
- Berkolaborasi untuk mencari solusi dan **solusi digital prioritas**.
- Menemukan cara **berkerja/layanan digital baru** yang lebih efisien, melalui **rancangan** proses bisnis digital (*digital by design*)

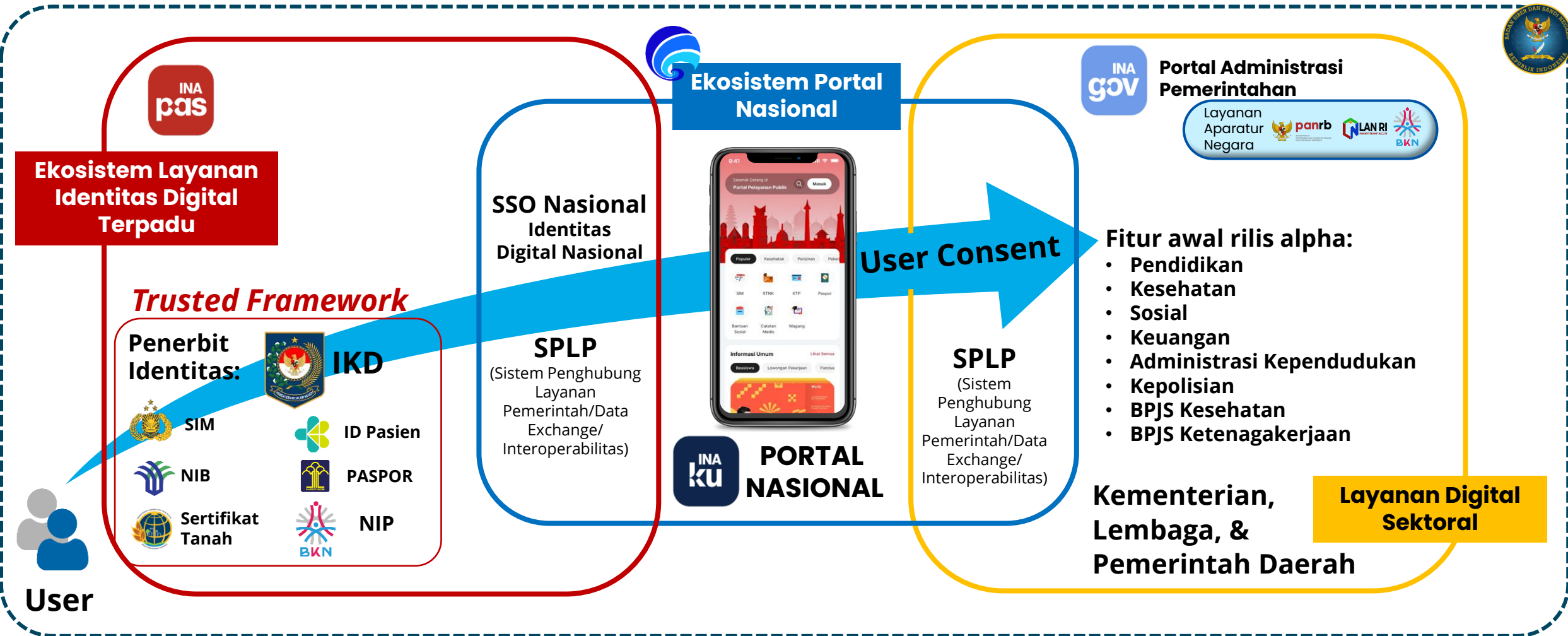


Transformasi Tata Kelola sebagai kunci sukses Modernisasi Administrasi Negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat



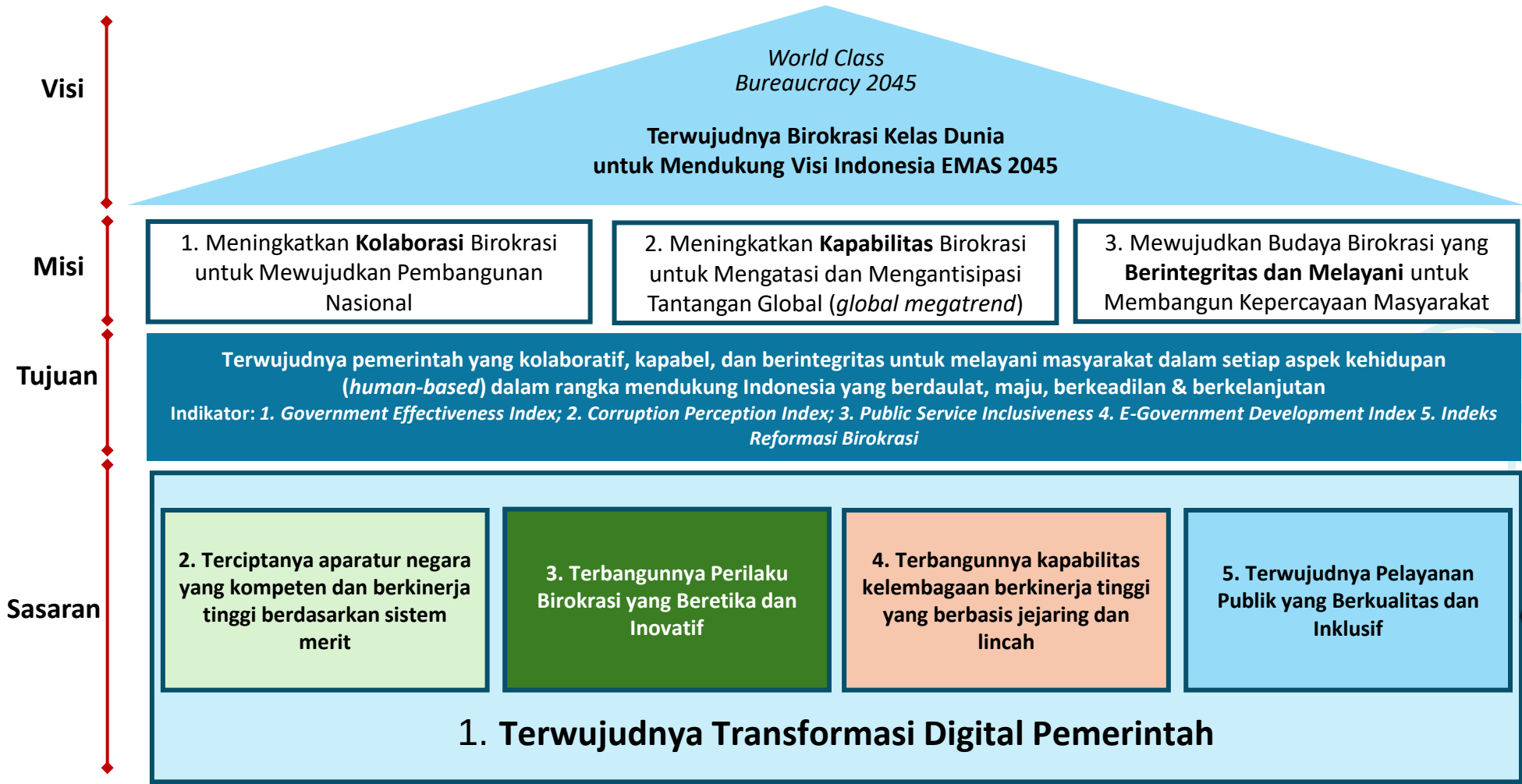
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Menghapus Silo Perlu Diperkuat untuk Mewujudkan Layanan Digital Nasional Terpadu

Kompleksitas Ekosistem Digital ID saat ini merupakan bukti konkrit banyaknya sistem lintas sektor dan tidak berorientasi kebutuhan pengguna, sehingga diperlukan Penyelenggara Keterpaduan Layanan di tingkat nasional melalui INA Digital



Pemanfaatan sertifikat elektronik dari BSSN dan Peruri, diimplementasikan oleh **INA DIGITAL**

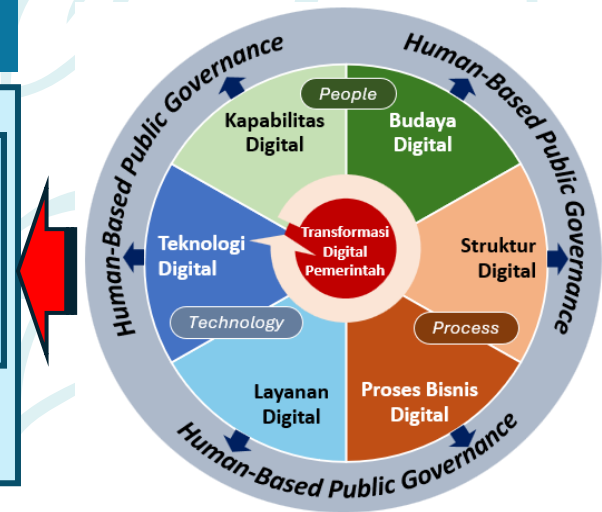
Kerangka arsitektur GDRBN 2025–2045 dengan menempatkan
untuk mencapai Birokrasi Berkelas Dunia (*World Class Bureaucracy*) dalam mendukung
visi **INDONESIA MAJU** menuju **INDONESIA EMAS 2045**



Transformasi Tata Kelola
Pemerintah untuk Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintah

Strategi Pemerintah Indonesia melalui **Transformasi Digital** untuk wujudkan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan

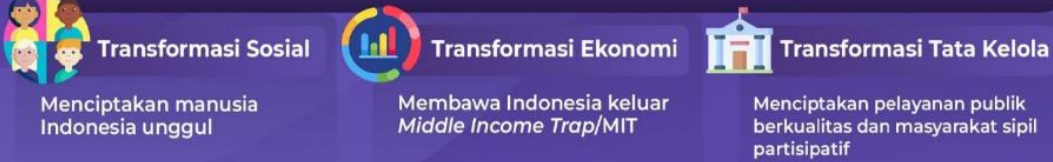
Selaras dengan Tren Dunia dalam Upaya modernisasi administrasi pemerintahan (*Public Administration Modernization*)



Transformasi Indonesia Menuju Indonesia Emas

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan.

Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045



Arah (Tujuan) Pembangunan



Keberhasilan transformasi secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah perlu didukung oleh landasan transformasi sebagai faktor pempampu

Landasan Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045



Arah (Tujuan) Pembangunan

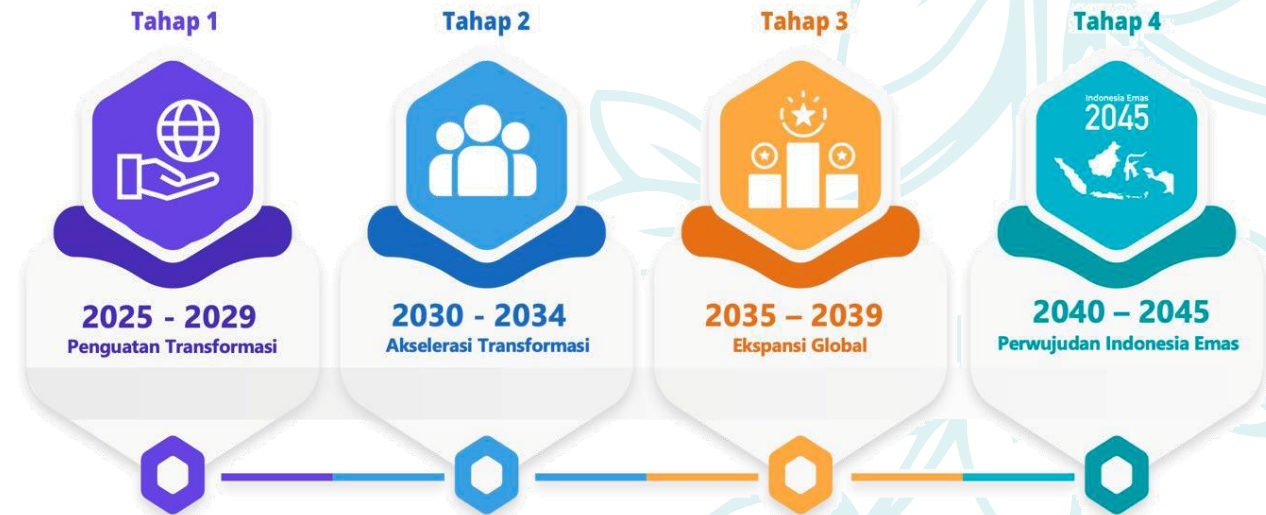


*IE = Indonesia Emas

Visi Indonesia Emas 2045

UU 59/2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045



Pentahapan RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045

TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL* KERANGKA TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL

*UU 59/2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045

Tahap 1



2025 - 2029
Penguatan Transformasi

Tahap 2



2030 - 2034
Akselerasi Transformasi

Tahap 3



2035 - 2039
Ekspansi Global

Tahap 4



2040 - 2045
Perwujudan Indonesia Emas

SMART GOVERNMENT

1. Terbentuknya kebijakan nasional Pemerintah Digital, sebagai kelanjutan kebijakan SPBE diselaraskan dengan perkembangan terkini di dunia dan kemajuan teknologi
2. **Terbentuknya kebijakan Transformasi Digital Nasional berupa UU**
3. Peningkatan kapabilitas dan budaya ASN Digital
4. Penguatan kelembagaan dan tata laksana lintas instansi pemerintah pada K/L/D dalam pelaksanaan transformasi digital
5. Layanan Digital Sektoral sesuai Arsitektur Digital pada K/L/D, **menjadi bagian dari Portal Nasional** dan telah **memanfaatkan DPI (Identitas Digital)** dengan capaian Tingkat 5 Maturitas Layanan Digital (layanan telah berorientasi pengguna)
6. **Pemanfaatan AI pada sektor prioritas Layanan Digital Pemerintah**
7. Pencapaian peringkat 50 besar di dunia untuk EGD

Transformasi Tata Kelola
Pemerintah melalui
Transformasi Digital Pemerintah

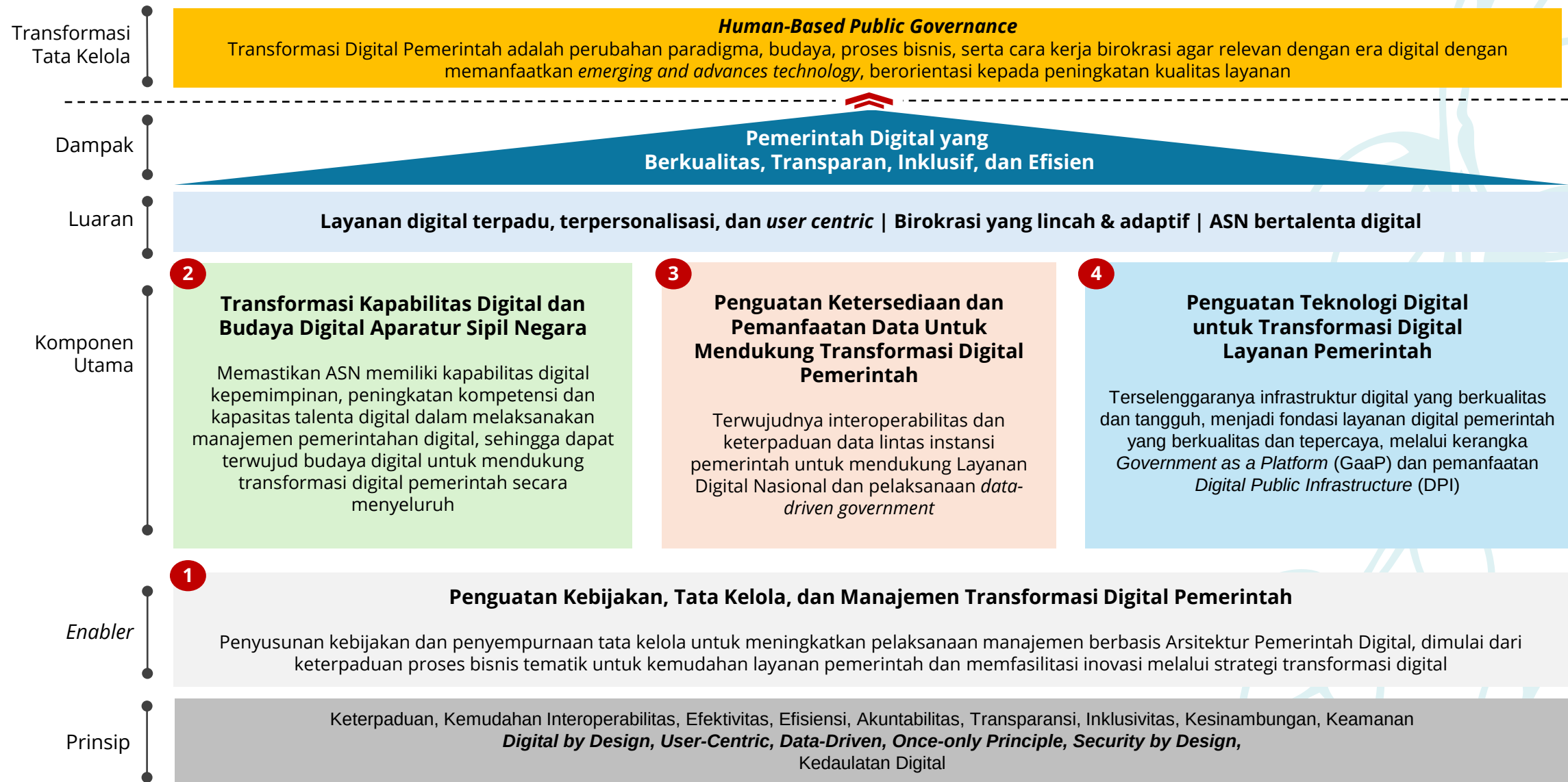
SMART NATION

1. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital, dengan interoperabilitas layanan digital Pemerintah Indonesia dengan negara di kawasan ASEAN, melalui pemanfaatan interoperabilitas antar DPI
 2. Penerapan kebijakan Transformasi Digital Nasional, dengan berdampak pada peningkatan ekonomi digital dan partisipasi masyarakat (Masyarakat digital)
 3. Peningkatan literasi digital masyarakat
 4. **Pemanfaatan AI pada Transformasi Digital Nasional**
 5. Pencapaian peringkat 30 besar di dunia untuk EGD
1. Pelaksanaan Transformasi Digital Nasional yang membawa pengaruh internasional di Kawasan Asia Pasifik, melalui interoperabilitas antar DPI
 2. Penerapan lanjutan kebijakan Transformasi Digital Nasional, dengan berdampak pada peningkatan ekonomi digital dan partisipasi masyarakat (Masyarakat digital)
 3. Peningkatan literasi digital masyarakat
 4. **Pemanfaatan lanjutan AI dan perkembangan teknologi maju lainnya pada Transformasi Digital Nasional**
 5. Pencapaian peringkat 20 besar di dunia untuk EGD

Transformasi Indonesia melalui
Transformasi Digital Nasional

Kerangka Operasional Sasaran 1. Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah

Strategi Transformasi Digital Pemerintah 2025–2029



TAHAPAN 2025 – 2029

PETA RENCANA TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH



No	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
		Terwujudnya transisi transformasi digital pemerintah		Terwujudnya penguatan transformasi digital pemerintah		Terwujudnya penerapan pemerintah digital
1	Perumusan Kebijakan Transformasi Digital (Pilar Pemerintah Digital)	Perumusan kebijakan transformasi digital pemerintah (perubahan Perpres terkait dengan SPBE, SDI dan Keamanan Informasi) dan Peta Rencana Pemerintah Digital	Perumusan kebijakan teknis transformasi digital pemerintah dan rinci teknis Peta Rencana Pemerintah Digital	Perumusan kebijakan teknis transformasi digital pemerintah dan rinci teknis Peta Rencana Pemerintah Digital - lanjutan		
2	Perumusan Kebijakan Transformasi Digital Nasional			Perumusan kebijakan teknis transformasi digital nasional (UU Transformasi Digital)	Perumusan kebijakan teknis transformasi digital nasional (UU Transformasi Digital)	Perumusan kebijakan pelaksanaan UU Transformasi Digital
3	Penataan Transformasi Digital Pemerintah	Bimbingan teknis arsitektur digital kepada K/L untuk To-Be Design dengan target capaian Tingkat 4 Maturitas Layanan Digital	Bimbingan teknis arsitektur digital kepada K/L lanjutan dan Pemda Predikat SPBE Memuaskan untuk To-Be Design dengan target capaian Tingkat 4 Maturitas Layanan Digital	Bimbingan teknis arsitektur digital kepada K/L/D lanjutan untuk To-Be Design dengan target capaian Tingkat 4 Maturitas Layanan Digital	Bimbingan teknis arsitektur digital kepada K/L/D untuk To-Be Design dengan target capaian Tingkat 5 Maturitas Layanan Digital	Bimbingan teknis arsitektur digital kepada K/L/D lanjutan untuk To-Be Design dengan target capaian Tingkat 5 Maturitas Layanan Digital
		Penguatan kelembagaan dan tata laksana lintas instansi pemerintah pada K/L/D dalam pelaksanaan transformasi digital				
		Peningkatan kapabilitas dan budaya ASN Digital				
		Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Layanan Digital Sektoral sesuai Arsitektur Digital kepada K/L/D, menjadi bagian dari Portal Nasional dan pemanfaatan DPI dengan capaian Tingkat 1 Maturitas Layanan Digital (layanan informasi)	Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Layanan Digital Sektoral sesuai Arsitektur Digital kepada K/L/D, menjadi bagian dari Portal Nasional dan pemanfaatan DPI dengan capaian Tingkat 2 Maturitas Layanan Digital (layanan interaksi)	Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Layanan Digital Sektoral sesuai Arsitektur Digital kepada K/L/D, menjadi bagian dari Portal Nasional dan pemanfaatan DPI dengan capaian Tingkat 3 Maturitas Layanan Digital (layanan transaksi)	Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Layanan Digital Sektoral sesuai Arsitektur Digital kepada K/L/D, menjadi bagian dari Portal Nasional dan pemanfaatan DPI dengan capaian Tingkat 4 Maturitas Layanan Digital (layanan kolaborasi)	Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Layanan Digital Sektoral sesuai Arsitektur Digital kepada K/L/D, menjadi bagian dari Portal Nasional dan pemanfaatan DPI dengan capaian Tingkat 5 Maturitas Layanan Digital (optimalisasi layanan berorientasi pengguna)
4	Jumlah K/L/D dengan Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digital	409 IP Baseline: 350 IP di 2024 dengan predikat baik ke atas	300 IP dengan predikat baik ke atas	359 IP dengan predikat baik ke atas	469 IP dengan predikat baik ke atas	533 IP dengan predikat baik ke atas
5	Indeks SPBE Nasional (Indeks Pemerintah Digital Nasional/IPDN)	3,10 (Indeks SPBE Nas) Baseline: 2,85 di 2024	3,00 (Indeks Pemerintah Digital Nasional - IPDN)	3,15 (IPDN)	3,38 (IPDN)	3,50 (IPDN)

Modernisasi Administrasi Negara

Transformasi digital tidak hanya fokus pada digitasi ataupun digitalisasi, tapi memastikan peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat

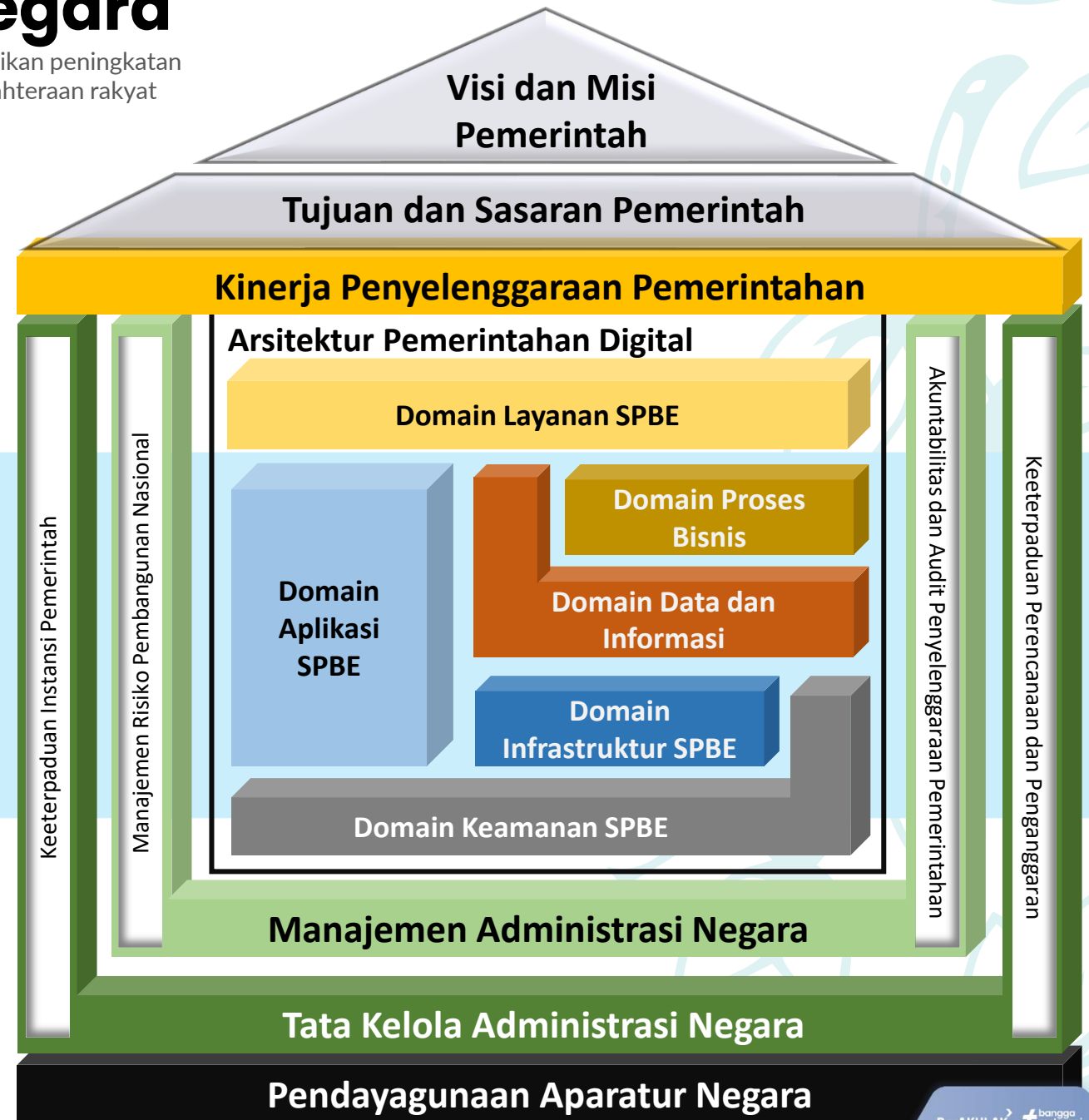
"Transformasi Efisiensi" - Prof. Stella Christie, 10 Desember 2024

**Peningkatan
efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintah.**

Up-Systeming

Up-Skilling

Re-Skilling





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

TERIMA KASIH

 @kempanrb

 @kemenpanrb

 [www .menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

  @Kementerian PANRB